

**ANALISIS FATWA DSN-MUI TERHADAP MEKANISME  
DISKON *UJRAH* PADA PEMBIAYAAN *RAHN* DI PEGADAIAN  
SYARIAH CABANG KEDUNGDORO SURABAYA**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**AFIATUS SA'ADAH ROHIM**

**NIM. C92214136**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**Surabaya**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afiatus Sa'adah Rohim  
NIM : C92214136  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam /  
Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Fatwa DSN-MUI terhadap Mekanisme  
Diskon *Ujrah* pada Pembiayaan *Rahn* di Pegadaian  
Syariah Cabang Kedungdoro Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 April 2018

Saya yang menyatakan,



Afiatus Sa'adah Rohim


NIM. C92214136

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Afiatus Sa'adah Rohim, NIM C92214136 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 April 2018

Pembimbing,



**Moch. Zainul Arifin, M. Pd. I**

**NIP. 197104172007101004**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Afiatus Sa'adah Rohim, NIM C92214136 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



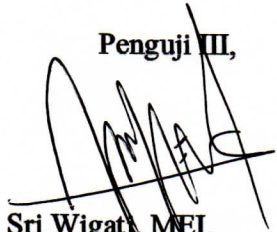
Moch. Zainul Arifin, M. Pd. I.  
NIP. 197104172007101004

Penguji II,



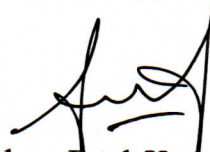
Dra. Nurhayati, M. Ag.  
NIP. 196806271992032001

Penguji III,



Sri Wigati, MEI.  
NIP. 197302212009122001

Penguji IV,



Ikhsan Fatah Yasm, SHI, MH.  
NIP. 198905172015031006

Surabaya, 03 Mei 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



Prof. Dr. H. Sahid HM., M.Ag., M.H.  
NIP. 196803091996031002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Afiatus Sa'adah Rohim  
NIM : C92214136  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam  
E-mail address : affiarohim22@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS FATWA DSN-MUI TERHADAP MEKANISME DISKON UJRAH PADA PEMBIAYAAN RAHN DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG KEDUNGORO SURABAYA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 08 Mei 2018

Penulis

(Afiatus Sa'adah Rohim)



## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Fatwa DSN-MUI terhadap Mekanisme Diskon *Ujrah* pada Pembiayaan *Rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Kedungdoro Surabaya” penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana Mekanisme Diskon *Ujrah* pada Pembiayaan *Rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Kedungdoro Surabaya? dan Bagaimana Analisis Fatwa DSN-MUI terhadap Mekanisme Diskon *Ujrah* pada Pembiayaan *Rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Kedungdoro Surabaya?

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*Field Research*) di Pegadaian Syariah Cabang Kedungdoro Surabaya, dengan menggunakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data yang dikumpulkan disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yakni terlebih dahulu memaparkan tentang mekanisme diskon *ujrah* pada pembiayaan *rahn* yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Kedungdoro Surabaya selanjutnya dianalisis berdasarkan Fatwa DSN-MUI.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; pertama: praktik mekanisme diskon *ujrah* pada pembiayaan *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Kedungdoro Surabaya akan diberikan oleh perusahaan kepada nasabahnya yang mengambil pinjaman di bawah jumlah maksimal yang bisa didapat. Penentuan besaran diskon *ujrah* yang akan diberikan kepada tiap-tiap nasabahnya ditentukan berdasarkan jumlah pinjamannya, semakin kecil pinjman maka akan semakin besar diskon *ujrah* yang akan didapat. Sehingga nantinya akan berpengaruh pada tarif *ujrah* yang dibebankan kepada nasabah. Kedua: Praktek mekanisme pemberian diskon ujah pada Pegadaian Syariah Cabang Kedungdoro Surabaya tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. Mekanisme nya tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan yaitu, dalam mekanisme pemberian diskon *ujrah* kepada nasabah berdasarkan kepada nominal pinjaman nasabah. Padahal sebenarnya pada ketentuan fatwa tersebut menjelaskan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhūn tidak boleh ditentukan berdasakan jumlah pinjaman. Artinya berapapun nominal pinjaman oleh nasabah yang mengajukan marhūn dengan kualitas dan kuantitas yang sama, besar taksiran yang sama, namun berbeda nominal pinjamannya maka diskon *ujrah* nya tidak boleh dikaitkan dengan nominal pinjaman si nasabah.

Saran yang dapat penulis berikan pada Pegadaian Syariah Cabang Kedungdoro Surabaya yakni, agar diskon *ujrah* tetap dapat diberikan untuk para nasabahnya namun tetap sesuai dengan Syariah yakni tidak lagi ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman nasabah yaitu dapat ditentukan berdasarkan waktu pelunasan yang lebih cepat dari yang telah diperjanjikan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta keperluan pengajuan pinjaman nasabah.

## DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR TRANSLITERASI .....	xiv
 <b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Kajian Pustaka .....	9
E. Tujuan Penelitian .....	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian .....	12
G. Definisi Operasional .....	12
H. Metode Penelitian .....	14
I. Sistematika Pembahasan .....	18
 <b>BAB II      LANDASAN TEORI</b>	
A. Pegadaian Syariah .....	20
B. <i>Rahn</i> .....	22
1. Pengertian <i>Rahn</i> .....	22
2. Rukun dan Syarat <i>Rahn</i> .....	24

3. Dasar hukum <i>Rahn</i> .....	26
4. Prinsip-prinsip <i>Rahn</i> .....	27
5. Berakhirnya Akad <i>Rahn</i> .....	28
C. Fatwa DSN-MUI tentang <i>Rahn</i> .....	30
D. <i>Ujrah</i> .....	31
E. Fatwa DSN-MUI tentang <i>Ujrah</i> .....	32
F. Diskon <i>Ujrah</i> .....	35
G. Fatwa DSN-MUI tentang Diskon <i>Ujrah</i> .....	36

## BAB III MEKANISME DISKON *UJRAH* PADA PEMBIAYAAN *RAHN* DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG KEDUNGORO SURABAYA

A. Gambaran Umum tentang Pegadaian Syariah Cabang Kedungdoro Surabaya .....	38
1. Sejarah Pegadaian .....	38
2. Visi dan Misi .....	42
3. Struktur Kepegawaian dan Job Description Pegadaian Syariah Cabang Kedungdoro Surabaya .....	43
4. Produk Pegadaian Syariah .....	48
B. Mekanisme Diskon <i>Ujrah</i> pada Pembiayaan <i>Rahn</i> di Pegadaian Syariah Cabang Kedungdoro Surabaya .....	61
C. Tanggapan Nasabah tentang Diskon <i>Ujrah</i> .....	64

**BAB IV ANALISIS FATWA DSN-MUI TERHADAP MEKANISME  
DISKON *UJRAH* PADA PEMBIAYAAN *RAHN* DI  
PEGADAIAN SYARIAH CABANG KEDUNGORO  
SURABAYA**

A. Mekanisme Diskon <i>Ujrah</i> pada Pembiayaan <i>Rahn</i> di Pegadaian Syariah Cabang Kedungdoro Surabaya .....	66
B. Analisis Fatwa DSN-MUI terhadap Mekanisme Diskon <i>Ujrah</i> pada Pembiayaan <i>Rahn</i> di Pegadaian Syariah Cabang Kedungdoro Surabaya .....	71









## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah khalifah Allah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan manusia. <sup>1</sup>

Sejatinya, kebahagiaan merupakan tujuan utama kehidupan manusia. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spiritual, dalam jangka pendek maupun panjang. Terpenuhinya kebutuhan yang bersifat material, seperti sandang, rumah, dan kekayaan lainnya, dewasa ini lebih banyak mendapatkan perhatian dalam ilmu ekonomi. Tepenuhinya kebutuhan material inilah yang disebut dengan sejahtera. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan manusia menghadapi kendala pokok yaitu, kurangnya sumber daya yang bisa digunakan untuk mewujudkan kebutuhan tersebut.<sup>2</sup>

Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah SWT telah memberikan aturan hidup melalui petunjuk Rasul-Nya, Nabi Muhammad saw. Petunjuk tersebut ialah *ad dīn al-Islām* (agama Islam).<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta: Erlangga, 2012), 2.

<sup>2</sup> P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 1.

<sup>3</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip ...*, 2.





dalam segala tindakannya serta jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.<sup>7</sup>

Selain itu, dalam hal bermuamalah dianjurkan untuk kepada sesama manusia agar saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, seperti dalam firman Allah SWT, Q.S Al-Māidah : 2

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, sesungguhnya siksa Allah amat berat.”<sup>8</sup>

Dalam persoalan ekonomi khususnya yang berprinsip syariah, juga bermacam-macam diantara jenis kerja sama dan tolong menolong yang telah membudaya di kalangan masyarakat yakni pinjam meminjam dan utang-piutang. Bentuk kerjasama tersebut banyak diwujudkan melalui lembaga keuangan baik bank maupun non bank, seperti misal pegadaian.<sup>9</sup>

Lembaga pegadaian di Indonesia sudah ada ketika Indonesia belum merdeka. Pada awalnya lembaga itu merupakan lembaga swasta. Keadaan itu juga berkelanjutan pada masa-masa awal kemerdekaan. Barulah pada tahun 1961, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 178 Tahun 1961 lembaga itu berubah menjadi perusahaan negara. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 108 tahun 1965 Perusahaan

<sup>7</sup> As- Sayyid Sabiq, *Fiqih As-Sunnah* (Jakarta: Darul Fath, Jilid V, Cetakan I, 2004), 12.

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2003), 216.

<sup>9</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafitia, 1999), 1.

Pegadaian syariah sendiri merupakan lembaga keuangan alternative bagi masyarakat guna menetapkan pilihan dalam pembiayaan di sektor riil. Biasanya kalangan yang berhubungan dengan pegadaian adalah masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan pembiayaan jangka pendek dengan margin yang rendah. Karena itulah pegadaian syariah harus lebih akomodatif dalam menyelesaikan persoalan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat.

Secara formal, keberadaannya pegadaian syariah berada dalam lingkup Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Karena Perum Pegadaian merupakan satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai.<sup>11</sup>

Pada dasarnya, produk-produk berbasis Islam memiliki karakteristik seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas

<sup>11</sup> Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 170.

Sebagaimana halnya institusi yang berlabel Islam, maka landasan konsep pegadaian syariah juga mengacu kepada Islam yang bersumber dari Alquran dan Hadits Nabi Muhammad saw. Adapun landasan yang dipakai yaitu Q.S Al-Baqarah : 283

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).”

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

[illegible]

Disamping itu, para ulama sepakat membolehkan akad *Rahn*. Landasan ini kemudian diperkuat dengan Fatwa Dewan Islam Nasional No. 25/ DSN-MUI/III/ 2002 Tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan yang tidak melanggar syariat Islam.<sup>13</sup> Salah satunya yakni, besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Seluruh kegiatan pegadaian syariah termasuk dana yang kemudian disalurkan kepada nasabah, murni berasal dari modal sendiri ditambah dana pihak ketiga dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Dari uraian ini dapat dicermati perbedaan yang cukup mendasar dari teknik transaksi pegadaian syariah dibandingkan dengan pegadaian konvensional, yaitu :

[illegible]





Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa *point-point* seperti berikut:

- Agar lebih terarahnya penulisan skripsi, serta menghindari pembahasan yang terlalu melebar, maka dibuatlah batasan masalah seperti berikut :

- [illegible]

- b. Analisis Fatwa DSN-MUI terhadap mekanisme diskon *ujrah* pada pembiayaan *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Kedungdoro Surabaya.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat, ada beberapa pokok permasalahan yang akhirnya dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme diskon *ujrah* pada pembiayaan *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Kedungdoro Surabaya?
2. Bagaimana analisis Fatwa DSN-MUI terhadap mekanisme diskon *ujrah* pada pembiayaan *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Kedungdoro Surabaya?

#### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan di telti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.<sup>15</sup>

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang lebih integral seperti yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah, maka penulis akan melakukan analisis lebih awal terhadap pustaka atau karya-karya

<sup>15</sup> Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: 2014), 8.

1. Muthiah Tuthiul : Membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan *ujrah* dalam pembiayaan multijasa akad *ijārah* di Koperasi BMT Muda Jawa timur Kantor Cabang Bungah Gresik.<sup>16</sup> Perbedaan dengan kajian tersebut dengan topik yang akan dibahas disini yaitu, membahas tentang analisis penetapan *ujrah* pada pembiayaan multijasa akad *ijārah*, sedangkan penulis disini akan mengkaji soal mekanisme diskon *ujrah* dalam pembiayaan *rahn*. Serta perbedaan lainnya yaitu tempat penelitian antara kajian terdahulu tersebut dengan penulis saat ini.
2. Qolbiyah Shofiyatul : Membahas tentang Tinjauan Fatwa DSN terhadap *ujrah* talangan haji yang melebihi tempo di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Gresik Jawa Timur.<sup>17</sup> Perbedaan dengan kajian tersebut dengan topik yang akan dibahas disini yaitu, membahas tentang analisis *ujrah* talangan haji yang melebihi tempo, sedangkan penulis disini akan mengkaji soal mekanisme diskon *ujrah*

<sup>17</sup> Qolbiyah Shofiyatul, “Tinjauan Fatwa DSN terhadap *ujrah* talangan haji yang melebihi tempo di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Gresik Jawa Timur” (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016), 6

3. Mawardi, M. Ilyas : Membahas tentang Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 25/III/2002 terhadap penetapan *ujrah* dalam akad *rahn* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo.<sup>18</sup> Perbedaan dengan kajian tersebut dengan topik yang akan dibahas disini yaitu, membahas tentang penetapan *ujrah*, sedangkan penulis disini akan mengkaji mengenai mekanisme diskon *ujrah*. Namun sama dalam hal pembiayaan akad *rahn*. Lain itu, perbedaan mendasar lainnya yaitu tempat penelitian diantara keduanya.

Dari pemaparan diatas, telah diketahui belum ada yang membahas secara khusus mengenai mekanisme diskon *ujrah*, sehingga dalam hal ini penulis akan lebih jauh mengkaji serta meneliti persoalan tentang “Analisis Fatwa DSN-MUI terhadap mekanisme diskon *ujrah* pada pembiayaan *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Kedungdoro Surabaya”

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penulis disini yaitu :

- <sup>18</sup> Mawardi, M. Ilyas, “Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 25/III/2002 terhadap penetapan *ujrah* dalam akad *rahn* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo” (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014), 9

## 1. Kegunaan Teoritis

- Memperkaya khazanah keilmuan serta literatur untuk mahasiswa, peneliti yang sejenis, atau peneliti dimasa yang akan mendatang.
- Memperluas wawasan bagi yang membaca khususnya mengenai Pegadaian Syariah.

Diharapkan dapat menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan hasil tulisan ini khususnya mengenai diskon *ujrah* pada pembiayaan *rahn*. Sekaligus menjadi bahan masukan dalam hal penetapan diskon *ujrah* pada pembiayaan *rahn*.

Agar memudahkan dalam memahami skripsi ini, penulis mendefinisikan beberapa istilah dari judul penelitian ini, yakni :

- [illegible]



disesuaikan menurut syariat Islam. Khususnya Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002 yang membahas tentang *rahn* serta Fatwa DSN-MUI No. 23 Tahun 2002 dan No. 46 Tahun 2005 yang membahas tentang potongan *ujrah*.

## 2. Mekanisme diskon

*ujrah*

: Ketentuan, cara kerja dalam penetapan potongan harga *ujrah* untuk pemeliharaan *marhūn* serta biaya sewa tempat. Dalam hal ini, besar *ujrah* tersebut ditentukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Kedungdoro Surabaya yang ditanggungkan kepada nasabah.

### 3. Pembiayaan *rahn*

: Menahan salah satu harta milik *rahin* (nasabah) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dari *murtahin* (Pegadaian Syariah Cabang Kedungdoro Surabaya).





Namun, tidak menutup kemungkinan akan ada pihak-pihak lain yang juga akan turut diwawancarai guna kelengkapan penulisan tugas akhir ini.

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencatat data yang sudah ada. Diantara kegiatannya yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>22</sup> yang tentunya berkaitan dengan topik penulisan skripsi ini. Dalam hal ini selain daripada itu, surat menyurat terkait perijinan hingga surat balasan untuk penelitian dan dokumentasi foto pada saat penelitian juga termasuk didalamnya.

a. *Checking* (Pengecekan)

<sup>22</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta: 2006), 231.







Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian ini oleh penulis.













- a). Telah dewasa
  - b). Berakal sehat
  - c). Atas keinginan sendiri secara bebas
- 2). Harta gadai (barang yang digadaikan), harus memiliki syarat :
- a). Dapat diserahterimakan
  - b). Bermanfaat
  - c). Milik *rahin* (orang yang menggadaikan)
  - d). Jelas
  - e). Tidak bersatu dengan harta lain
  - f). Dikuasai oleh *rahin*
  - g). Harta yang tetap atau dapat dipindahkan
  - h). Barang yang boleh diperjualbelikan.
- 3). Utang (*marhūn bih*). Syarat utang dapat dijadikan alasan gadai adalah:
- a). berupa utang yang tetap dan dimanfaatkan
  - b). Utang harus lazim pada waktu akad
  - c). Utang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*<sup>12</sup>
- 4). Akad (Ijab Qabul)

Ijab qabul dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara kedua belah pihak.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), hal 248.

<sup>13</sup> Ibid, 249.

### 3. Dasar Hukum *Rahn*

Adapun dasar hukum *rahn*, yaitu :

a. Dasar hukum Alquran

Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah : 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ  
الَّذِي أُوْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ  
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

b. Dasar hukum Al-Hadits

قَالَ يَحْيَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ فِيمَا نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ يَرْهَنَ الرَّجُلُ الرَّهْنَ عِنْدَ الرَّجُلِ بِالشَّيْءِ وَفِي الرَّهْنِ فَضْلٌ عَمَّا رُهِنَ بِهِ فَيَقُولُ الرَّاهِنُ لِلْمُرْهِنِ إِنْ جِئْتُكَ بِحَقِّكَ إِلَى أَجَلٍ يُسَمِّيهِ لَهُ وَإِلَّا فَالرَّهْنُ لَكَ بِمَا رُهِنَ فِيهِ قَالَ فَهَذَا لَا يَصْلُحُ وَلَا يَجِلُ وَهَذَا الَّذِي تُهَيِّ عَنْهُ وَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ بِالَّذِي رُهِنَ بِهِ بَعْدَ الْأَجَلِ فَهُوَ لَهُ وَأَرَى هَذَا الشَّرْطَ مُنْفَسِحًا

“Yahya berkata; telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Musayyab bahwa Rasulullah

c. Dasar hukum Kaidah Fikih

“Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.<sup>15</sup>

Pada dasarnya prinsip pada akad *rahn* yaitu akad *tabarru'* yakni

a. Akad *rahn* adalah akad *tabarru'*

<sup>14</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Surabaya : UINSA Press, 2014), 153.

[illegible]

b. Harus terhindar dari riba

## 5. Berakhirnya Akad *Rahn*

a. Diserahkannya benda yang digadaikan kepada si pemiliknya.

b. Utang telah dilunasi seluruhnya.

c. Penjualan secara paksa.

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 27.

[illegible]









#### E. Fatwa DSN-MUI tentang *Ujrah*

Sesuai dengan pertimbangan yang telah disepakati oleh Dewan Syariah Nasional, yakni :

- [illegible]

- Selanjutnya dalam fatwa tersebut juga mengatur mengenai ketentuan objek ijarah, diantaranya ialah :

- Ketentuan mengenai kewajiban LKS dan nasabah dalam pembiayaan ijarah, dibagi menjadi dua diantaranya ;

- [illegible]

*Ujrah* ialah imbalan atau balas jasa atas sesuatu yang telah diambil manfaatnya. Diskon sendiri yaitu potongan. Sehingga diskon *ujrah* yaitu potongan atas kewajiban pembayaran atas manfaat yang telah didapat. Pembayaran upah merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang yang menyewa atau mengupah seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.

Dalam sistem gadai yang menggunakan akad ijarah, pembayaran *ujrah* dibebankan kepada penggadai atas pihak yang menerima barang gadai, sebagai balas budi karena telah menitipkan barang gadai miliknya untuk dijaga dan dirawat. Diskon *ujrah* merupakan hak dari nasabah yang diberikan oleh pihak penerima gadai. Ketentuan besar kecilnya *ujrah* sekaligus diskon *ujrah* ditentukan oleh pihak penerima gadai. Dalam penentuan *ujrah* maupun diskon *ujrah* agar terhindar dari riba, maka telah ditentukan ketentuan seperti berikut :

1. Harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase.
2. Sifatnya harus nyata, jelas, pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan.

[illegible]

3. Tidak terdapat tambahan biaya yang tidak disebutkan dalam awal akad.<sup>25</sup>

### G. Fatwa DSN-MUI tentang Diskon *Ujrah*

Dalam bermuamalah agar sesuai dengan yang telah disyariatkan, maka berikut ketentuan diskon *ujrah* menurut Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 dan fatwa DSN-MUI No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang pemberian potongan yang dengan ketentuan-ketentuan berikut :

1. Lembaga Keuangan Syariah boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah dalam transaksi (akad) yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
2. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan LKS.
3. Pemberian potongan tidak boleh diperjanjikan dalam akad.

<sup>25</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), 118.

1. Jika salah satu pihak tidak menunikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

1. Jika salah satu pihak tidak menunikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

MEKANISME DISKON *UJRAH* PADA PEMBIAYAAN *RAHN* DI  
PEGADAIAN SYARIAH CABANG KEDUNGORO SURABAYA

## 1. Sejarah Pegadaian

Karena kekalahan Belanda atas Inggris, tahun 1811. Pemerintah Inggris mengambil alih dan membubarkan Bank Van Leening. Pemerintah Inggris memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk mendirikan usaha gadai. Namun kebijakan tersebut dalam perjalanannya memberikan dampak buruk bagi usaha masyarakat. Salah satunya dengan munculnya rentenir, lintah darat yang membuat kehidupan masyarakat saat itu tidak stabil. Karena

38



bunga yang sangat tinggi dibebankan kepada masyarakat. Ketika Belanda berkuasa kembali, maka bank Van Leening yang semula dibubarkan, didirikan kembali. Namun terdapat praktek-praktek tidak sehat yang merugikan masyarakat dan pemerintah kolonial. Baru pada tahun 1901, didirikan Pegadaian Negara Pertama di kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Belanda melakukan perbaikan sistem menjadi lembaga Pegadaian yang lebih baik. Seperti suku bunga yang tinggi, dilakukan penyesuaian. Lelang yang dilakukan penuh rekayasa, dirubah menjadi lelang yang benar-benar transparan. Sedangkan barang jaminan milik nasabah yang semula tidak dirawat oleh pihak Pegadaian saat itu, selanjutnya menjadi perhatian penuh dari Lembaga Pegadaian untuk selalu merawatnya. Inilah babak baru munculnya lembaga Pegadaian di Indonesia yang kian hari mengalami perubahan yang lebih baik.

Pada tahun 1905, Pegadaian berbentuk Lembaga Resmi Jawatan. Kemudian 1961 berubah dari bentuk Jawatan menjadi PN. PN pun akhirnya berubah menjadi Perjan pada tahun 1969. Tahun 1990 bentuk Badan Hukum Perjan berubah menjadi PERUM. Perubahan ini dapat dikatakan momen yang merubah Pegadaian menjadi perusahaan modern. Dengan tangan dingin Bapak Drs.

Syamsir Kadir, MBA yang menjabat Direktur Utama Perum Pegadaian periode 1990 sampai dengan 2001.<sup>2</sup>

Dan akhirnya pada tahun 2012, tepatnya 1 April 2012, bertepatan dengan ulang tahun Pegadaian ke 111, bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian berubah menjadi Persero, menjadi PT Pegadaian (Persero) sampai saat ini. Saat itu Direktur Utama Pegadaian adalah Bapak Suwhono.

Ada masa yang penuh bersejarah. Saat Pegadaian terus tumbuh memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat Indonesia. Bersamaan itu pula, kesadaran masyarakat (muslim) untuk bertransaksi ekonomi secara syariah mulai menggeliat. Keinginan masyarakat untuk bermuamalah yang bebas dari bunga. Kondisi ini direspon oleh Perum Pegadaian dengan membentuk unit usaha yang berkonsentrasi mengembangkan Gadai dengan sistem syariah.<sup>3</sup>

Pada tahun 2003, mulai beroperasi ULGS, unit layanan gadai Syariah di Jakarta. Memberi alternatif kepada masyarakat yang ingin bertransaksi gadai secara syariah. Respon masyarakat cukup bagus. Akhirnya dibentuk ULGS-ULGS di kota-kota besar lainnya, seperti Makassar, Surabaya, Bandung, Semarang, Medan dan kota lainnya. Bahkan untuk Aceh, semua Pegadaian konvensional dikonversi

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Ibid.

SBU Syariah Spin Off, menjadi PT Pegadaian Syariah yang merupakan anak perusahaan dari PT Pegadaian (Persero). Sehingga lebih leluasa melakukan perkembangan bisnis syariah dengan produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Jadi Sejarah Pegadaian Syariah atau Sejarah Pegadaian Syariah di Indonesia, khususnya di PT Pegadaian (Persero) ada sejak tahun 2003.<sup>4</sup>

Pegadaian Syariah Cabang Kedungdoro sendiri yang terletak di Jl. Kedungdoro No. 100 B berdiri sejak Agustus 2017, dengan jumlah nasabah mencapai ribuan merupakan pindahan dari Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. Didirikan dan diresmikan oleh Direktur Utama Kantor Wilayah Perum Pegadaian Surabaya pada 2005.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Ahmad Zainudin, Wawancara Surabaya, 9 Desember 2017.











#### 4) CSO (*Customer Service Officer*)

- a) Memberikan kepuasan pelayanan kepada *Rahin* apabila terdapat keluhan atau masalah yang sedang dihadapi
- b) Membantu menyelesaikannya dengan mencari jalan keluar masalah tersebut.<sup>9</sup>

- Melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran serta pembukuan *Marhūn*
- Menerima *Marhūn* selain barang kanting untuk disimpan di Gudang
- Secara berkala memeriksa keadaan Gudang penyimpanan *Marhūn*
- Menyusun sesuai urutan nomor surat bukti *rahn*

[illegible]





## Model Bisnis Pegadaian Produk ARRUM Haji



Sumber : Website Pegadaian Syariah

Multi Pembayaran Online (MPO) melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon/pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online. Layanan MPO merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di Bank.<sup>12</sup>

- a) Tersedia di outlet pegadaian seluruh Indonesia
- b) Pembayaran secara real time, sehingga memberi kepastian dan kenyamanan dalam bertransaksi
- c) Biaya administrative kompetitif
- d) Pembayaran tagihan selain dapat dilakukan secara tunai juga dapat bersinergi dengan gadai emas

<sup>12</sup> Produk-produk Pegadaian Syariah, dalam..., lembar 2.

- 2) Persyaratan MPO yaitu :

- ### c. Konsinyasi Emas

Konsinyasi emas adalah layanan titip jual emas batangan di pegadaian sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman karena disimpan di pegadaian. Keuntungan dari hasil penjualan emas batangan diberikan kepada nasabah, oleh sebab itu juga emas yang dimiliki lebih produktif.<sup>13</sup>

- a) Dikelola oleh PT. Pegadaian (Persero) yang merupakan BUMN terpercaya

[illegible]

- PEGAIDAN KONSINYASI EMAS**

  - ✓ JUAL - BELI EMAS TETAP UNTUNG WALAU HARGA NAIK-TURUN
  - ✓ BARANG AMAN DIASURANSIKAN
  - ✓ PENGELOLAAN TRANSPARAN

**1** Ibu Rani membeli emas di Pegadaian, daripada disimpan di rumah karena resiko hilang atau kecurian, ia memutuskan untuk mengkonsinyasikan emas batangannya di G24 Pegadaian.

**2** Ibu Rani datang ke Galeri 24 Pegadaian, kemudian melakukan registrasi dan menandatangani akad perjanjian konsinyasi yang berlaku 3 bulan.

**3** Dalam masa konsinyasi, Ibu Tika membeli emas batangan. Pada saat tersebut, emas milik Ibu Rani-lah yang diambil sebagai stock penjualan.

**4** Pegadaian akan menggantikan emas batangan milik Ibu Rani dan menyerahkan bagi hasil penjualan emas.

**5** Emas Batangan milik Ibu Rani tetap utuh dan mendapatkan bagi hasil penjualan konsinyasi disaat harga emas turun atau pun sedang naik.

**Pegadaian**  
Membeli Emas Tanpa Risiko

Sumber : Website Pegadaian Syariah

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga terjangkau. Layanan in

1) Keunggulan tabungan emas

- a) Tersedia di kantor cabang di seluruh Indonesia (sementara hanya tersedia di kantor cabang Piloting)
- b) Pembelian emas dengan harga terjangkau (mulai dari berat 0,01 gram)
- c) Layanan petugas uang profesional
- d) Alternative invstasi yang aman untuk menjaga portofolio asset
- e) Mudah dan cepat dicairkan untuk memenuhi kebutuhan dana

## 2) Prosedur tabungan emas

- a) Membuka rekening Tabungan Emas di Kantor Cabang Pegadaian hanya dengan melampirkan fotocopy identitas diri (KTP/ SIM/ Passpor) yang masih berlaku.
- b) Mengisi formulir pembukaan rekening serta membayar biaya administrasi sebesar lima ribu rupiah dan biaya fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar tiga puluh ribu rupiah
- c) Proses pembelian emas dapat dilakukan dengan kelipatan 0.01 gram

[illegible]

- e. Mulia

1) Keunggulan dari mulia

- <sup>15</sup> Produk-produk Pegadaian Syariah, dalam..., lembar 5.



- b) Alternative investasi yang aman untuk menjaga portofolio asset
  - c) Sebagai asset, emas batangan sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak
  - d) Tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 5 gram s.d 1 kilogram
  - e) Emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran, kolektif ataupun arisan
  - f) Uang muka mulai dari 10% s.d 90% dari nilai logam mulia
  - g) Jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan s.d 36 bulan
- 2) Persyaratan pengajuan mulia yaitu :
- a) Untuk pembelian secara tunai, nasabah cukup datang ke outlet pegadaian (galeri 24) dengan membayar nilai logam mulia yang akan dibeli
  - b) Untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan (lihat table di bawah ini)

Tabel 1

## Pola Pembayaran Angsuran Nasabah Logam Mulia

	UMUM	KOLEKTIF	ARISAN
Logam Mulia	Logam mulia cap antam atau	Setiap anggota bebas memilih	Logam mulia cap







Pembiayaan amanah darri pegadaian Syariah yaitu pembiayaan berprinsip Syariah kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro, untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.<sup>20</sup>

[illegible]

Pembiayaan gadai Syariah (*rahn*) dai pegadaian Syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai Syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dana man

1) Keunggulan dari produk gadai Syariah

- Tersedia di outlet pegadaian Syariah di seluruh Indonesia
- Prosedur pengajuannya sangat mudah. Calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya ke outlet pegadaian
- Proses pinjaman sangat cepat, hanya butuh waktu 15 menit
- Pinjaman mulai dari 50 ribu rupiah sampai 200 juta rupiah atau lebih
- Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar *ijārah* saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman
- Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan *ijārah* selama masa pinjaman
- Tanpa perlu membuka rekening
- Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai
- Barang jaminan tersimpan aman di pegadaian

2) Persyaratan pembiayaan gadai Syariah yaitu :

- Foto copy KPT atau identitas resmi lainnya
- Menyerahkan barang jaminan

[illegible]

*Ujrah* adalah biaya yang dibebankan *murtahin* kepada *rahin* atas jasa perawatan *marhūn*. Jasa perawatan *marhūn* ini yaitu meliputi untuk biaya sewa tempat, pemeliharaan serta keamanan *marhūn* selama digadaikan. Besar kecilnya biaya tersebut tergantung dengan nilai taksiran dan lamanya barang disimpan atau lamanya pinjaman. Besar *ujrah* pada pegadaian Syariah ditetapkan setiap atau per 10 hari. Ditentukan berdasarkan besarnya nilai taksiran *marhūn*.

Persentase tarif *ujrah* setiap atau per 10 hari untuk setiap golongan yang berbeda-beda ditentukan karena beberapa hal berikut :

- [illegible]



Kebijakan penetapan persentase *ujrah* yang diterapkan di pegadaian Syariah yakni berdasarkan equivalent rate dengan system bunga yang diterapkan oleh pegadaian konvensional. Karena keduanya meruoakan satu corporate maka total tarif *ujrah* secara keseluruhan tarifnya akan sama hanya berbeda dari cara perhitungannya. Adapun cara perhitungan *ujrah* pada pembiayaan *rahn* yaitu ( $ujrah = \text{nilai taksiran} \times \text{tarif } ujrah$ ).<sup>23</sup>

Diskon *ujrah* ialah potongan biaya *ijārah* (*ujrah*). Diberikan oleh pegadaian Syariah kepada *rahin* atas bentuk apresiasi karena besar pinjaman yang diambil oleh *rahin* dibawah nilai pinjaman maksimal yang semestinya bisa didapat oleh *rahin*. Karena bersifat hadiah maka diskon

<sup>23</sup> PT. Pegadaian, *Pedoman Operasional Gadai Pegadaian Syariah* (Surabaya: Maret, 2015), 15.

<sup>24</sup> PT. Pegadaian, Peraturan Direksi Pegadaian Syariah, (Surabaya : September 2017), 6.

Untuk mengetahui apakah adanya diskon *ujrah* berikut efisien dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada nasabah, maka berikut pendapat dari nasabah Pegadaian Syariah Cabang Kedungdoro :

1. Ada seorang nasabah bernama Ibu Umar Khoir yang menggadaikan perhiasan emasnya, beliau mengambil pinjaman dengan pinjaman maksimal, menurutnya beliau tidak mengetahui adanya diskon *ujrah* apabila mengambil pinjaman dibawah pinjaman maksimal, sebab kata beliau pegawainya tidak pernah memberitahunya .<sup>25</sup>
2. Ada seorang nasabah Kak Lira beliau menggadaikan perhiasan emas, setiap menggadaikan *marhūn* nya selalu mengambil pinjaman maksimal, beliau tahu jika ada potongan *ujrah*, namun menurutnya lebih baik mengambil pinjaman maksimal sebab potongan pada *ujrah*

[illegible]

Dari hasil wawancara dan tanggapan dari beberapa nasabah Pegadaian Syariah Cabang Kedungdoro Surabaya bahwa rata-rata nasabah nya selalu mengambil pinjaman maksimal dan tidak tahu jika ada diskon *ujrah* sebab kurangnya informasi dari pihak Pegadaian Syariah Cabang Kedungdoro Surabaya.

<sup>28</sup> Sari, Wawancara, Surabaya, 18 Desember 2017.

**ANALISIS FATWA DSN-MUI TERHADAP MEKANISME DISKON *UJRAH***  
**PADA PEMBIAYAAN *RAHN* DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG**  
**KEDUNGORO SURABAYA**

Tidak dapat dipungkiri bahwa sektor ekonomi tetap saja mendominasi di masyarakat. Besarnya kebutuhan akan segala keperluan yang dihadapinya sehingga membutuhkan ekonomi yang kuat pula. Tak jarang pula bentuk kegiatan pinjam meminjam, gadai menggadaikan menjadi kegiatan yang mendominasi dalam masyarakat. Pada dasarnya, prinsip muamalah menurut syariat yaitu saking tolong menolong dalam hal kebajikan untuk meringankan beban sesamanya. Oleh sebab itu Lembaga keuangan Syariah perlu ada tindak lanjut dalam menyikapi permasalahan masyarakat yang ada dengan berbagai macam produk yang telah diusung oleh setiap Lembaga keuangan Syariah yang sudah ada. Misalnya saja produk pembiayaan *rahn* oleh Pegadaian Syariah merupakan bentuk tolong menolong berupa menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan dengan system gadai Syariah.

Pada penetapan tarif *ujrah* di Pegadaian Syariah Cabang Kedungdoro Surabaya terdapat perbedaan tarif pada *rahin* yang menggadaikan barangnya meskipun dengan jenis, kualitas, maupun kuantitas barang. Yang membedakan besar *ujrah* yang dibebankan pada keduanya yakni pemberian diskon *ujrah* yang diberikan lebih besar kepada pinjaman nasabah yang lebih kecil dari besar taksiran pinjaman dan pemberian diskon *ujrah* yang lebih kecil kepada pinjaman nasabah yang lebih besar dari taksiran pinjaman yang bisa didapatkan oleh *rahin* tersebut.

Hal tersebut berarti pada Pegadaian Syariah Cabang Kedungdoro Surabaya pemberian diskon *ujrah* pada para nasabahnya pemberian dan perhitungannya masih dikaitkan dengan jumlah nominal pinjaman *rahin*.

<sup>2</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, 247

<sup>3</sup> Ahmad Sarwat, *Fikih Shari-hari* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), 95.







$$= 83\%$$

Sesuai dengan table diskon *ujrah*, persentase 83% maka diskon *ujrah* nya yaitu 7,3% dari *ujrah* awal.

Perhitungan diskon *ujrah* :

Diskon  $ujrah$  = nilai  $ujrah$  awal - (tarif diskon  $ujrah$  X  $ujrah$  awal)

$$= 34.080 - (7,3\% \times 34.080)$$

$$= 34.080 - 239,582$$

$$= 33.840 \text{ (per 10 hari nya)} \times 12$$

$$= 406.080$$

Jadi jumlah *ujrah* yang dibebankan kepada *rahin* atas *marhūn* yang digadaikan dengan jumlah pinjaman 4.000.000 selama 120 hari yaitu 406.080

Berdasarkan simulasi di atas, telah kita ketahui munculnya perbedaan tarif *ujrah* diantara kedua nya yaitu adanya diskon *ujrah* yang didasarkan pada besar kecil nya pinjaman nasabah. Semakin kecil pinjamannya maka akan besar diskon yang didapatkan, sebaliknya semakin besar jumlah pinjamannya maka akan semakin kecil diskon yang

**B. Analisis Fatwa DSN-MUI terhadap Mekanisme Diskon *Ujrah* pada Pembiayaan *Rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Kedungdoro Surabaya**

[illegible]

Dari uraian tersebut bahwa diskon (potongan) *ujrah* menurut beberapa fatwa diatas mengenai yang pemberlakuannya diskon *ujrah* dibolehkan. Asalkan mekanisme yang dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak diperjanjikan didalam akad, besar potongan diserahkan kepada kebijakan LKS, dan dalam penentuan pemberian diskon *ujrah* tidak boleh dikaitkan dengan besar kecilnya pinjaman nasabah.

[illegible]

## PENUTUP

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan penulis, berikut kesimpulan dari apa yang telah dipaparkan :

- 73

## B. Saran

1. Diharapkan dalam penentuan diskon *ujrah* tidak lagi dikaitkan dengan nominal pinjaman nasabah. Untuk menanggulangi hal tersebut, pegadaian Syariah dapat memberikan diskon *ujrah* dengan memperhatikan dari aspek lain, misalnya diskon dapat diberikan kepada nasabah yang melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, dapat dilihat dari keperluan pengajuan pinjaman, mulai dari keperluan sangat mendesak,

mendesak, sampai keperluan tidak mendesak. Sehingga tetap mengutamakan *tabarru'* nya. Dengan pilihan yang seperti itu, maka pemberian diskon *ujrah* tidak lagi dikaitkan dengan besar kecil pinjaman nasabah. Namun berdasarkan dari keperluan dan penggunaan pinjaman si nasabah.

2. Diharapkan pihak pegadaian Syariah lebih pro aktif untuk menyampaikan adanya diskon *ujrah* kepada nasabah dan memberikan perincian perhitungannya kepada nasabah yang telah mendapatkan diskon *ujrah*, mengingat masih banyak nasabah yang tidak mengetahui apa itu diskon *ujrah* dan adanya diskon *ujrah* yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Kedungdoro Surabaya.

1. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

2. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: PT. Al-Farabi Press, 2001.

3. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan dan Teknik*. Jakarta: Rineka Cipta: 2006.

4. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format dan Teknik*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.

5. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2001.

6. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

7. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga, 2001.

- 76

- Lubis, Suhrawardi K. Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, Edisi I, Cetakan II, 2014.
- M. Ilyas, Mawardi. *“Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 25/III/2002 terhadap penetapan ujarah dalam akad rahn di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo”*. Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014.
- Mardani. *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan I, 2011.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta : Rajawali Pers, 2015.
- Muslich. Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Nawawi, Ismail. *Keuangan Islam : Diskursus Teori, Studi Kasus dan Pengantar Praktek Pada Kelembagaan Keuangan Bank dan Non Bank*. Sidoarjo : Dwiputra Pustaka Jaya, 2015.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Noverdi, Fajar. *“Perbedaan Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional”*, dalam [http://fajar\\_noverdi.blogspot.co.id/2013/03/pegadaian-syariah-dan-pegadaian.html](http://fajar_noverdi.blogspot.co.id/2013/03/pegadaian-syariah-dan-pegadaian.html), diakses pada 14 November 2017.
- Novi, Amanita. *“Pegadaian”*, dalam [http://staffnew.uny.ac.id /upload/132318570/pendidikan/ pegadaian.pdf](http://staffnew.uny.ac.id/upload/132318570/pendidikan/pegadaian.pdf), diakses pada 14 November 2017.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi III, Cetakan ke III. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- PT. Pegadaian, *Pedoman Operasional Gadai Pegadaian Syariah*. Surabaya: Maret, 2015.
- PT. Pegadaian, *Peraturan Direksi Pegadaian Syariah*. Surabaya : September 2017.





